



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDI DAMANSYAH
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 208417

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.240.000.000**

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 960.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 405 m2/80 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
4. Tanah Seluas 15550 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 355.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
6. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 367.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.369.759.360
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.331.759.360
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.331.759.360

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.